

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rakhmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024.

Naskah perencanaan ini berisi gambaran umum pengelolaan Sumber daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ada di Kabupaten Cilacap sesuai penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2022, Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2024.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap tahun 2024 tidak terlepas dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap 2023-2026. Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap pada tahun 2024, diantaranya adalah percepatan pencapaian target indikator Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini tentunya masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran, pendapat atau kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya, besar harapan kami semoga informasi singkat pada tulisan ini akan berguna dan bermanfaat.

Sekian terima kasih.

Cilacap, Juli 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN CILACAP

TARYO, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196908081997031007

**DAFTAR ISI**

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Bab I PENDAHULUAN I-1

* 1. Latar Belakang I-2
  2. Landasan Hukum 1-4
  3. Maksud dan Tujuan 1-8
  4. Sistematika Penulisan I-9

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH II-1

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun 2022

dan Capaian Renstra Bakesbangpol II-1

1. Analisis Kinerja Pelayanan Bakesbangpol II-22
2. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bakesbangpol II-26
3. Review Terhadap RKPD II-33
4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-38

Bab III TUJUAN DAN SASARAN BAKESBANGPOL III-1

1. Telahaan terhadap kebijakan Nasional III-1
2. Tujuan dan Sasaran Renja Bakesbangpol III-2
3. Inovasi Bakesbangpol III-3
4. Program dan Kegiatan Bakesbangpol III-4

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAKESBANGPOL IV-1

Bab IV PENUTUP V-1

**DAFTAR TABEL**

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bakesbangpol

dan Pencapaian Renstra Bakesbangpol s/d Tahun 2022 II-2

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakesbangpol II-16

Tabel 2.3 Review terhadap RKPD Tahun 2024 II-22

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku

Kepentingan Kabupaten Cilacap Tahun 2024 II-27

Tabel 3.1 Tujuan Dan Sasaran Bakesbangpol III-2

Tebel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bakesbangpol

Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 IV-4

|  |
| --- |
| LAMPIRAN XXVII |
| PERATURAN BUPATI CILACAP |
| NOMOR 14 TAHUN 2023 |
| TENTANG |
| RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH |
| KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 |

# **BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **LATAR BELAKANG**

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan suatu sistem untuk mengendalikan bahwa pembangunan harus berjalan secara terus menerus guna menjamin kelangsungan roda pemerintahan. Keserasian program pembangunan antara pusat dan daerah tetap harus dipertahankan.

Sebagai salah satu dokumen perencanaan OPD, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap Tahun 2024 disusun melalui skala prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam membantu Bupati yaitu merumuskan dan menyelenggarakan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk menjamin terselenggaranya perumusan dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap, rencana kerja dituangkan dalam wujud dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun) dan perencanaan tahunan, yang saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap merupakan dokumen perencanaan untuk 1 tahun. Secara substansial memuat program dan kegiatan serta pendanaannya.

Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif, digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan APBD.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap tahun 2024 untuk mendukung pencapaian program, kegiatan dan sasaran pembangunan Kabupaten Cilacap. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen Perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

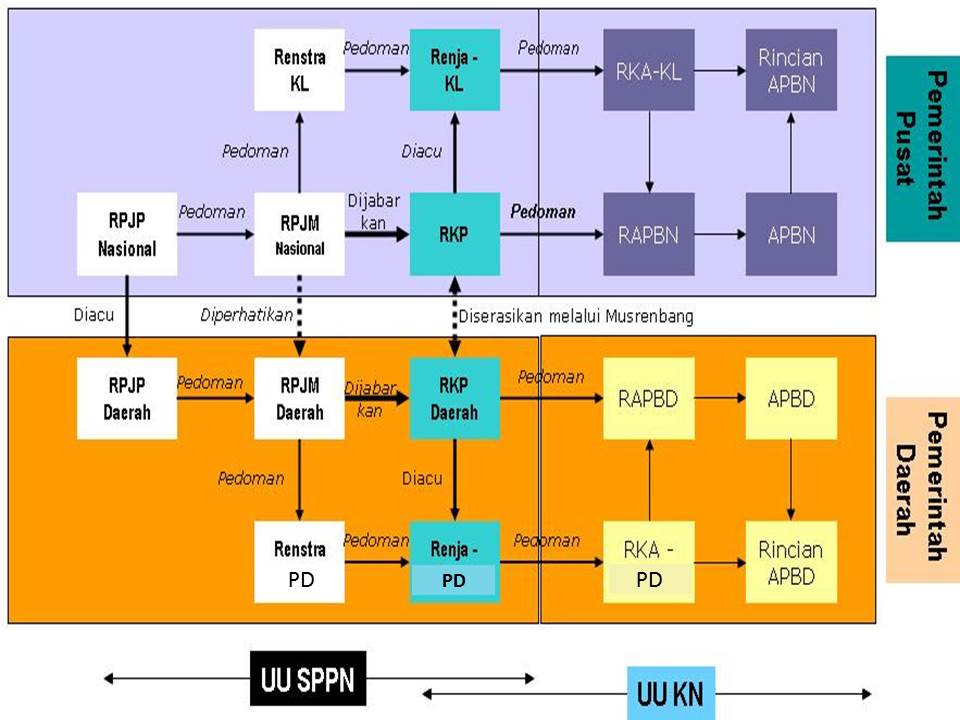
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap tahun 2005 - 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dimana periode Renstra ini merupakan segmen pertengahan dari periode RPJPD tersebut. RPJPD Kabupaten Cilacap merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Cilacap, sementara RPJMD Kabupaten Cilacap tersebut menjadi Pedoman dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap.
2. RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026 sebagai dokumen perencanaan untuk periode empat tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap. Selanjutnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Cilacap untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026. RKPD Kabupaten Cilacap menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan berpedoman pada Renstra PD. Selanjutnya RKPD Kabupaten Cilacap menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Cilacap.

Keterkaitan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Bagan 1**

**Alur Perencanaan Dan Keterkaitan**

**Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



**Bagan 1.2.**

**Keterkaitan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

**KabupatenCilacap dengan Dokumen Perencanaan Daerah**

RJPD KAB. CILACAP

RENSTRA BAKESBANGPOL

RPD KAB. CILACAP

RKPD KAB. CILACAP

RENJA BAKESBANGPOL

KUA - PPAS

R-APBD KAB. CILACAP

KEGIATAN BAKESBANGPOL

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap tahun 2024 untuk mendukung pencapaian program, kegiatan dan sasaran pembangunan Kabupaten Cilacap.

* 1. **LANDASAN HUKUM**

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemeruntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan PemerintahNomor 13 Tahun 2O19 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197).
    1. **MAKSUD DAN TUJUAN**
       1. Maksud

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap adalah untuk membuat Rencana Kerja Tahunan sebagai dokumen yang menjabarkan dari RPD program dan kegiatan selama 1 Tahun berjalan sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam Renstra.

* + 1. Tujuan

Secara umum tujuan Rencana KerjaBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap adalah :

* 1. Sebagai pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah
  2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun berjalan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap.
  3. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024.
  4. **SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap meliputi 5 (Lima) Bab Pembahasan yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BABII : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun 2022 dan Capaian Renstra Bakesbangpol, Analisis Kinerja Pelayanan Bakesbangpol, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bakesbangpol, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BAKESBANGPOL

Memuat tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Bakesbangpol, Inovasi Bakesbangpol serta Program dan Kegiatan Bakesbangpol.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAKESBANGPOL

Memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilakukan oleh Bakesbangpol.

BAB V : P E N U T U P

Memuat kesimpulan Renja Bakesbangpol.

# **BAB II**

**HASIL EVALUASI RENJA BAKESBANGPOL TAHUN 2022**

1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun 2022 dan Capaian Renstra Bakesbangpol**

Evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol tahun 2022 dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan Bakesbangpol Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan–kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Kabupaten Cilacap tahun lalu, dan realisasi Renstra Bakesbangpol Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Bakesbangpol Kabupaten Cilacap dan/atau realisasi APBD untuk Bakesbangpol Kabupaten Cilacap. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam evaluasi adalah:

* 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
  5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Bakesbangpol Kabupaten Cilacap; dan
  6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi setiap program/kegiatan berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan pada tabel 2.1 berikut ini :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABEL 2.1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAKESBANGPOL DAN CAPAIAN RENSTRA BAKESBANGPOL S/D TAHUN 2022** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KABUPATEN CILACAP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***SKPD*** | | ***:*** | ***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap*** | | | | | | | | |  | |  | |  |  | | |  |  | | | |  | |  | |
| **Kode** | | | | | **Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan** | | **Indikator Kinerja Program (*outcomes*), Kegiatan (*output*) dan Sub Kegiatan (output)** | **Target Kinerja Capaian Program perangkatan daerah 2017 -2022 dan Renstra perangkat daerah tahun 2023-2026, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Tahun 2022** | **Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun / 2021** | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) | | | | | **Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2023** | | **Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023** | | **Catatan** | | | | |  | |  | |
| Target Renja Tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | | Tingkat Realisasi (%) | | **Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023** | **Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)** |  | |  | |
|  | |  | |
| 1 | | | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8=(7/6) | | 9 | | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | 12 | | | | |  | |  | |
| **RENSTRA BAKESBANGPOL 2017-2022** | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| **1.05.02.1** | | | | | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | **Terpenuhinya administrasi perkantoran setiap bulan** | **72 bulan** | **60 bulan** | 12 bulan | 12 bulan | | 100 | | **-** | | **72 bulan** | **100** |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.1.1.2 | | | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | Tersedianya biaya langganan jasa komunikasi, air dan listrik | 72 bulan | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | | 100 | | - | | 72 bulan | 100 |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.1.1.7 | | | | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | | Tersedianya jasa administrasi keuangan | 72 bulan | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | | 100 | | - | | 72 bulan | 100 |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.1.1.10 | | | | | Penyediaan alat tulis kantor | | Tersedianya alat tulis kantor | 72 bulan | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | | 100 | | - | | 72 bulan | 100 |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.1.1.11 | | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 72 bulan | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | | 100 | | - | | 72 bulan | 100 |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.1.1.13 | | | | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 72 bulan | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | | 100 | | - | | 72 bulan | 100 |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.1.1.17 | | | | | Penyediaan makanan dan minuman | | Tersedianya makanan dan minuman | 72 bulan | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | | 100 | | - | | 72 bulan | 100 |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.1.1.18 | | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 72 bulan | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | | 100 | | - | | 72 bulan | 100 |  | | | | |  | |  | |
| **1.05.02.2** | | | | | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | **Prosentase sarana dan prasaran aparatur kondisi Baik.** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | | **100** | | **-** | | **100%** | **100** |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.2.2.24 | | | | | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | | Terpeliharanya gedung kantor | 72 bulan | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | | 100 | | - | | 72 bulan | 100 |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.2.2.4 | | | | | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional, roda 4 dan roda 2 | 30 unit 48 unit | 25 unit 40 unit | 5 unit 8 unit | 5 unit 8 unit | | 100 | | - | | 30 unit 48 unit | 100 |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.2.2.28 | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | | Tersedianya Pralatan Gedung Kantor | 72 bulan | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | | 100 | | - | | 72 bulan | 100 |  | | | | |  | |  | |
| **1.05.02.3** | | | | | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | **Prosentase kehadiran dan Kedisiplinan ASN sesuai ketentuan** | **100%** | **100%** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **100%** | **100** |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.3.3.5 | | | | | Pengadaan Pakaian khusus hari- hari tertentu | | Terlaksananya Pengadaan pakaian seragam Batik Lurik | 160 stel | 88 stel | - | - | | - | | - | | 88 stel | 55% | Refocussing Anggaran | | | | |  | |  | |
| **1.05.02.5** | | | | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | **Prosentase aparatur yang memiliki kapasitas sesuai kebutuhan** | **100%** | **100%** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **100%** | **100** |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.5.5.1 | | | | | Pendidkan dan Pelatihan Formal | | Terlaksananya kegiatan pendidikan dan Pelatihan Formal | 20 orang | 8 orang | - | - | | - | | - | | 8 orang | 40 | Refocussing Anggaran | | | | |  | |  | |
| **1.05.02.7** | | | | | **Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja.** | | **Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | | **100** | | **-** | | **100%** | **100** |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.7.7.2 | | | | | Penyususnan Renja Perangkat Daerah | | Tersusunnya Dokumen Renja OPD | 10 dokumen | 8 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | | 100 | | - | | 10 dokumen | 100 |  | | | | |  | |  | |
| **1.05.02.15** | | | | | **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** | | **Jumlah konflik sosial di daerah** | **0 kasus** | **0 kasus** | **0 kasus** | **0 kasus** | | **100** | | **-** | | **0 kasus** | **100** |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.15.15.2 | | | | | Pengendalian Keamanan Lingkungan | | Terlaksananya sosialisasi pengendalian keamanan lingkungan | 2000 orang | 1400 orang | 200 orang | 200 orang | | 100 | | - | | 1600 orang | 80 | Refocussing Anggaran | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.15.15.8 | | | | | Peningkatan Kompetensi bagi Intelgent Daerah | | Terselenggaranya pelatihan peningkatan Kompetensi Intelgent daerah | 120 orang | 74 orang | 25 orang | 25 orang | | 100 | | - | | 99 orang | 82,5 |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.15.15.19 | | | | | Penanganan Koflik Sosial | | Terbentuknya kader pelopor penanganan konflik sosial di daerah | 1840 orang | 1040 orang | 200 orang | 200 orang | | 100 | | - | | 1240 orang | 67,39 | Refocussing Anggaran | | | | |  | |  | |
| **1.05.02.16** | | | | | **Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal** | | **Jumlah kasus kriminalitas (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya)** | **0 kasus** | **0 kasus** | **0 kasus** | **0 kasus** | | **100** | | **-** | | **0 kasus** | **100** |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.16.16.18 | | | | | Rapat Kerja Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) | | Terlaksananya kegiatan Rapat Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. | 3200 orang | 2560 orang | 640 orang | 640 orang | | 100 | | - | | 3200 orang | 100 |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.16.16.22 | | | | | Kewaspadaan Dini di Daerah | | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Kegiatan Unsur Pimpinan Daerah | 36 bulan | 24 bulan | 12 bulan | 12 bulan | | 100 | | - | | 36 bulan | 100 |  | | | | |  | |  | |
| **1.05.02.17** | | | | | **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan** | | **Jumlah kasus konflik Agama** | **0 kasus** | **0 kasus** | **0 kasus** | **0 kasus** | | **100** | | **-** | | **0 kasus** | **100** |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.17.17.2 | | | | | Peningkatan rasa solidaritas dan Ikatan sosial dikalangan masyarakat | | Terselenggaranya seminar, talkshow dan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan | 1630 orang | 1230 orang | 200 orang | 200 orang | | 100 | | - | | 1430 orang | 87,73 |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.17.17.3 | | | | | Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai - nilai Luhur Budaya Bangsa | | Terlaksananya orientasi Bela Negara bagi Pemuda/Pelajar | 1500 orang | 1050 orang | 200 orang | 200 orang | | 100 | | - | | 1750 orang | 116,67 |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.17.17.5 | | | | | Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi nilai-nilai Pancasila | | Terlaksananya kegiatan Sosialisasi, Revitalisasi, Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila | 950 orang | 1010 orang | 200 orang | 200 orang | | 100 | | - | | 1210 orang | 127,37 |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.17.17.6 | | | | | Refleksi Nilai budaya dalam kaitannya dengan ketahanan bangsa | | Terlaksananya kegiatan Refleksi Nilai budaya dalam kaitannya dengan ketahanan bangsa | 900 orang | 920 orang | 100 orang | 100 orang | | 100 | | - | | 1020 orang | 110,87 |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.17.17.7 | | | | | Seminar Talkshow Ketahanan ekonomi | | Terlaksananya seminar, talkshow dan diskusi ketahanan ekonomi . | 950 orang | 450 orang | 100 orang | 100 orang | | 100 | | - | | 550 orang | 57,89 | Refocussing Anggaran | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.17.17.12 | | | | | FKUB Pemuda Lintas Iman | | Terlaksananya kegiatan FKUB Pemuda lintas Iman | 575 orang | 460 orang | 100 orang | 100 orang | | 100 | | - | | 560 orang | 97,39 |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.17.17.13 | | | | | Peningkatan Penyuluh dan Pendidik Kerukunan Umat Beragama | | Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peningkatan penyuluh dan pendidik kerukunan umat beragama | 680 orang | 460 orang | 100 orang | 100 orang | | 100 | | - | | 560 orang | 82,35 |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.17.17.14 | | | | | Peningkatan Kerukunan Umat Begarama bagii Pelajar dan Santri | | Terlaksananya Keg. Sosialisasi Peningkatan Kerukunan Umat beragama bagi Pelajar dan Santri. | 1100 orang | 890 orang | 200 orang | 200 orang | | 100 | | - | | 1090 orang | 99,09 |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.17.17.19 | | | | | Sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) | | Terlaksananya Sosialisasi kerukunan Umat beragama. | 1500 orang | 1515 orang | 100 orang | 100 orang | | 100 | | - | | 1615 orang | 107,67 |  | | | | |  | |  | |
| **1.05.02.18** | | | | | **Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan** | | **Prosentase Masyarakat yang mengikuti bela Negara** | **2,55%** | **1,7%** | **0,55%** | **0,55%** | | **100** | | **-** | | **2,25%** | **100** |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.18.18.4 | | | | | Sosialisasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara ( PPBN ) | | Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara | 1080 orang | 580 orang | 200 orang | 200 orang | | 100 | | - | | 780 orang | 72,22 | Refocussing Anggaran | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.18.18.5 | | | | | Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) | | Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) | 790 orang | 470 orang | 150 orang | 150 orang | | 100 | | - | | 620 orang | 78,48 | Refocussing Anggaran | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.18.18.7 | | | | | Fasilitasi Bantuan LSM/ Ormas | | Terlaksananya Fasilitasi Penyaluran bantuan bagi LSM / ORMAS | 72 bulan | 36 bulan | 12 bulan | 12 bulan | | 100 | | - | | 72 bulan | 100 |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.18.18.10 | | | | | Peningkatan Wawasan kebangsaan baqgi Generasi Muda | | Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda. | 4320 orang | 3150 orang | 500 orang | 500 orang | | 100 | | - | | 3650 orang | 84,49 |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.18.18.11 | | | | | Peningkatan kesadaran ketahanan bangsa bagi ORMAS | | Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran ketahanan bangsa bagi ORMAS . | 950 orang | 750 orang | 200 orang | 200 orang | | 100 | | - | | 950 orang | 100 |  | | | | |  | |  | |
| **1.05.02.20** | | | | | **Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)** | | **Prosentase terbentuknya KAPA/KAMA Narkoba Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa** | **100%** | **80%** | **20%** | **20%** | | **100** | | **-** | | **100%** | **100** |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.20.20.10 | | | | | Pembentukan KAPA dan KAMA | | Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan KAPA dan KAMA Narkoba. | 1550 orang | 1550 orang | 150 orang | 150 orang | | 100 | | - | | 1700 orang | 109,68 |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.20.20.11 | | | | | Jambore Anti Narkoba | | Terlaksananya kegiatan Jambore anti Narkoba. | 1200 orang | 1150 orang | 200 orang | 200 orang | | 100 | | - | | 1350 orang | 112,5 |  | | | | |  | |  | |
| **1.05.02.21** | | | | | **Program Pendidikan Politik Masyarakat** | | **Prosentase pemilih yang berpartisipasi pada Pemilu** | **65%** | **65%** | **65%** | **65%** | | **100** | | **-** | | **65%** | **100** |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.21.21.1 | | | | | Penyuluhan Kepada Masyarakat | | Terlaksananya Kegiatan penyuluhan politik kepada masyarakat | 2500 orang | 2800 orang | 700 orang | 700 orang | | 100 | | - | | 3500 orang | 140 |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.21.21.5 | | | | | Fasilitasi Bantuan Partai Politik | | Terlaksananya penelitian dan pemeriksaan Verifikasi pemberian bantuan keuangan kepada parpol | 100 orang | 80 orang | 20 orang | 20 orang | | 100 | | - | | 100 orang | 100 |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.21.21.13 | | | | | Sosialisasi Undang- undang Pemilu | | Terlaksananya kegiatan Sosialisasi undang-undang pemilu | 2000 orang | 1800 orang | 700 orang | 700 orang | | 100 | | - | | 2500 orang | 125 |  | | | | |  | |  | |
| 1.05.02.21.21.14 | | | | | Bintek Administrasi partai Politik | | Terlaksananya Kegiatan Bintek Administrasi partai Politik | 240 orang | 200 orang | 40 orang | 40 orang | | 100 | | - | | 240 orang | 100 |  | | | | |  | |  | |
| **RENSTRA BAKESBANGPOL 2023 - 2026** | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | | | | |  | |  | |
|  | | | | | | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah** | **100%** |  |  |  | |  | | **100%** | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.01.2.01 | | | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah | 100% |  |  |  | |  | | 100% | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.01.2.01.01 | | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 dokumen |  |  |  | |  | | 2 dokumen | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.01.2.01.07 | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16 Laporan |  |  |  | |  | | 4 Laporan | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.01.2.02 | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah | 100% |  |  |  | |  | | 100% | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.01.2.02.01 | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 23 orang/bulan |  |  |  | |  | | 23 orang/bulan | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.01.2.05 | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaiaan perangkat daerah | 100% |  |  |  | |  | | 100% | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.01.2.06.02 | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 48 paket |  |  |  | |  | | 12 paket | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.01.2.06.04 | | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 48 paket |  |  |  | |  | | 12 paket | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.01.2.06.05 | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 48 paket |  |  |  | |  | | 12 paket | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.01.2.06.09 | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 48 laporan |  |  |  | |  | | 12 laporan | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.01.2.08 | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaiaan perangkat daerah | 100% |  |  |  | |  | | 100% | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.01.2.08.02 | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 48 laporan |  |  |  | |  | | 12 laporan | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.01.2.08.03 | | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan | 48 laporan |  |  |  | |  | | 12 laporan | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.01.2.08.04 | | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 48 laporan |  |  |  | |  | | 12 laporan | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.01.2.09 | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaiaan perangkat daerah | 100% |  |  |  | |  | | 100% | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.01.2.09.02 | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 14 unit |  |  |  | |  | | 14 unit | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.01.2.09.06 | | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 40 unit |  |  |  | |  | | 40 unit | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.01.2.09.09 | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit |  |  |  | |  | | 1 unit | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| **8.01.02** | | | | | | **Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan** | **Cakupan kecamatan yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara** | **24 kecamatan** |  |  |  | |  | | **24 kecamatan** | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.02.2.01.03 | | | | | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 5200 orang |  |  |  | |  | | 1300 orang | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| **8.01.06** | | | | | | **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** | **Cakupan kecamatan yang terfasilitasi dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial** | **24 kecamatan** |  |  |  | |  | | **24 kecamatan** | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.06.2.01 | | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penaganan Konflik Sosial | Cakupan kecamatan yang terfasilitasi dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial | 24 kecamatan |  |  |  | |  | | 24 kecamatan | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.06.2.01.06 | | | | | | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 48 dokumen |  |  |  | |  | | 12 dokumen | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.06.2.01.05 | | | | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penang Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penang Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah | 16 laporan |  |  |  | |  | | 4 laporan | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| **8.01.03** | | | | | | **Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik** | **Persentase Pemilih yang Berpartisipasi dalan Pemilu** | **70%** |  |  |  | |  | | **70%** | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.03.2.01.03 | | | | | | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang PendidikanPolitik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, sertaPemantauan Situasi Politik Di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang PendidikanPolitik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, sertaPemantauan Situasi Politik Di Daerah | 5760 orang |  |  |  | |  | | 1440 orang | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.03.2.01.05 | | | | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan | Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan | 8 laporan |  |  |  | |  | | 2 laporan | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| **8.01.04** | | | | | | **Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | **Persentase LSM/OMRAS yang dibina** | **100,00%** |  |  |  | |  | | **25,00%** | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.04.2.01 | | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase LSM/OMRAS yang dibina | 100,00% |  |  |  | |  | | 25,00% | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.04.2.01.04 | | | | | | Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 800 orang |  |  |  | |  | | 200 orang | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| **8.01.05** | | | | | | **Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya** | **Cakupan kecamatan yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya** | **24 kecamatan** |  |  |  | |  | | **24 kecamatan** | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.05.2.01 | | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Cakupan kecamatan yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | 24 kecamatan |  |  |  | |  | | 24 kecamatan | |  |  |  | | | | |  | |  | |
| 8.01.05.2.01.04 | | | | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 4400 orang |  |  |  | |  | | 1100 orang | |  |  |  | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap s.d. tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masih terdapat program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja karena keterbatasan anggaran yang masih difokuskan untuk pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi Covid 19.
2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil agar target kinerja program/kegiatan dapat tercapai di akhir periode renstra adalah:
3. Kegiatan yang anggarannya mengalami *refocusing* akibat adanya pandemi Covid-19 agar dianggarkan kembali agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sehingga target indikator tercapai.
4. Jika ada keterbatasan anggaran yang memungkinkan tidak semua kegiatan mengalami *refocusing* dapat teranggarkan kembali maka penganggaran diprioritaskan pada kegiatan yang lebih *urgent* dan mendesak.
5. **Analisa Kinerja Pelayanan Bakesbangpol**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap sesuai dengan urusan kewenangan yang ditangani, maka tugas pokok dan fungsinya merupakan lembaga teknis yang menangani Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Fasilitasi Politik serta Ketahanan Bangsa. Salah satu tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan dalam bidang penelitian, yaitu memberikan Rekomendasi Penelitian / Survei, Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Perguruan Tinggi, serta mencatat lembaga, yayasan, dan perkumpulan kemasyarakatan LSM/ORMAS. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 127 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Surat Persetujuan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Cilacap. Pelaksanaan pelayanan tersebut ditangani pada Bidang Fasilitasi Politik dan Keamanan (Faspolkam). Hasil Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | **TABEL 2.2** | | **PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | **KABUPATEN CILACAP** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |
| **NO.** | **Indikator** | **SPM/ Standar Nasional** | **IKK** | **Target Renstra** | | | | | | **Realisasi Capaian** | | | | **Proyeksi** | | | | | | **Capaian Analisis** | |
|
| **Tahun 2022** | **Tahun 2023** | **Tahun 2024** | | **Tahun 2025** | | **Tahun 2022** | | | | **Tahun 2023** | **Tahun 2024** | | | | **Tahun 2025** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | | **9** | | | |  | **11** | | | | **12** | **13** | |
|  | **RENSTRA 2017-2022** |  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  |  | | | |  |  | |
| 1 | Terpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan daerah | - | - | 100% | - | - | | - | | 100% | | | | - | - | | | | - | Tercapai | |
| 2 | Tersedianya administrasi keuangan setiap bulan | - | - | 100% | - | - | | - | | 100% | | | | - | - | | | | - | Tercapai | |
| 3 | Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan | - | - | 12 bulan | - | - | | - | | 12 bulan | | | | - | - | | | | - | Tercapai | |
| 4 | Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan | - | - | 100% | - | - | | - | | 100% | | | | - | - | | | | - | Tercapai | |
| 5 | Persentase masyarakat yang mengikuti bela negara | - | - | 0,55% | - | - | | - | | 0,55% | | | | - | - | | | | - | Tercapai | |
| 6 | Persentase pemilih yang berpartisipasi pada pemilu | - | - | 65% | - | - | | - | | 65% | | | | - | - | | | | - | Tercapai | |
| 7 | Persentase terbentuknya KAPA/KAMA Narkoba (Kelompok Aksi Pelajar Anti Narkoba/kelompok Aksi Mahsiswa Anti Narkoba) tingkat kecamatan | - | - | 100% | - | - | | - | | 100% | | | | - | - | | | | - | Tercapai | |
| 8 | Jumlah kasus kriminalitas (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya) | - | - | 0 kasus | - | - | | - | | 0 kasus | | | | - | - | | | | - | Tercapai | |
|  | **RENSTRA 2023-2026** |  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  |  | | | |  |  | |
| 1 | Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah | - | - | - | 100% | 100% | | 100% | | - | | | | 100% | 100% | | | | 100% |  | |
| 2 | Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah | - | - | - | 100% | 100% | | 100% | | - | | | | 100% | 100% | | | | 100% |  | |
| 3 | Cakupan kecamatan yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara | - | - | - | 24 kecamatan | 24 kecamatan | | 24 kecamatan | | - | | | | 24 kecamatan | 24 kecamatan | | | | 24 kecamatan |  | |
| 4 | Persentase pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu | - | - | - | 70% | 70% | | 70% | | - | | | | 70% | 70% | | | | 70% |  | |
| 5 | Persentase LSM/ORMAS yang dibina | - | - | - | 25% | 50% | | 75% | | - | | | | 25% | 50% | | | | 75% |  | |
| 7 | Cakupan kecamatan yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | - | - | - | 24 kecamatan | 24 kecamatan | | 24 kecamatan | | - | | | | 24 kecamatan | 24 kecamatan | | | | 24 kecamatan |  | |
| 8 | Cakupan kecamatan yang terfasilitasi dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial | - | - | - | 24 kecamatan | 24 kecamatan | | 24 kecamatan | | - | | | | 24 kecamatan | 24 kecamatan | | | | 24 kecamatan |  | |

Dari tabel 2.2. tersebut diatas, dapat dilihat bahwa semua indikator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap untuk pencapaian indikatornya sudah sesuai dengan target yang telah direncanakan terkecuali untuk :

1. Pengamanan hari raya lebaran, natal dan tahun baru terhitung mulai tahun 2019 tidak bisa terlaksana karena kegiatan tersebut tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Bakesbangpol sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dialihkan ke OPD yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Pelaksanaan pengamanan terpadu Pemilu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang mana pada awalnya akan dilaksanakan pada tahun 2022 dikarenakan ada perubahan aturan untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 maka untuk rencana tahun 2022 diundur sesuai dengan aturan yang berlaku.

1. **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bakesbangpol**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Kabupaten Cilacap tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Bakesbangpol Kabupaten Cilacap.

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

1. Belum ada kebijakan yang disusun yang sesuai dengan bidang kesatuan bangsa dan politik
2. Belum semua lembaga-lembaga yang dibentuk memberikan peran dan dukungan pada bidang kesatuan bangsa dan politik
3. Belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan keuangan pada bidang kesatuan bangsa dan politik
4. **Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Rencana Dokumen perencanaan Daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen Rencana Kerja Bakesbangpol Kabupaten Cilacap Tahun 2024, RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2024, telaahan terhadap RKPD 2024 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Bakesbangpol Kabupaten Cilacap dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bakesbangpol Kabupaten Cilacap, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Bakesbangpol berdasarkan RKPD.

Review terhadap RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Bakesbangpol Kabupaten Cilacap.

Pada RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2024, anggaran belanja yang dialokasikan untuk Bakesbangpol Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 66.291.022.252,-. Sedangkan rencana anggaran belanja Bakesbangpol Kabupaten Cilacap pada Renja Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp 66.291.022.252,-.

Secara rinci review terhadap RKPD tersaji dalam tabel 2.3 berikut ini :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABEL 2.3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2024** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KABUPATEN CILACAP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
| ***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*** | | | | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |
| **No** | | | | **RKPD Tahun 2024** | | | | | | | | | **Hasil Analisis Kebutuhan** | | | | | | | | | **Catatan Penting** |
| **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | | **Indikator Kinerja** | | **Target Capaian** | | **Pagu Indikatif (Rp.)** | | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | | | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif (Rp.)** | | |
| **1** | | | | **2** | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | | | **10** | **11** | | | **12** |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | | |  |  | | |  |
| **1** | |  | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cilacap** | | **Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **12 Bulan** | | **4.585.290.239** | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cilacap** | **Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | **12 Bulan** | **4.585.290.239** | | |  |
|  | | 1.1 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cilacap | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 2 Dokumen | | 38.675.000 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cilacap | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2 Dokumen | 38.675.000 | | |  |
|  | | 1.2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cilacap | | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 23 Orang/ Bulan | | 3.275.445.439 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cilacap | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 23 Orang/ Bulan | 3.275.445.439 | | |  |
|  | | 1.3 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cilacap | | Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 33 Orang | | 17.500.000 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cilacap | Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 33 Orang | 17.500.000 | | |  |
|  | | 1.4 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cilacap | | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 12 Bulan | | 572.522.700 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cilacap | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 12 Bulan | 572.522.700 | | |  |
|  | | 1.5 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cilacap | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 12 Bulan | | 490.337.300 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cilacap | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 12 Bulan | 490.337.300 | | |  |
|  | | 1.6 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cilacap | | Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara | | 44 Unit | | 190.809.800 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cilacap | Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara | | | 44 Unit | 190.809.800 | | |  |
| 2 | |  | | **PROGRAM PENGUATAN IDIOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | Cilacap | | Cakupan kecamatan yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara | | 24 Kecamatan | | 955.311.731 | | **PROGRAM PENGUATAN IDIOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | Cilacap | Cakupan kecamatan yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara | | | 24 Kecamatan | 955.311.731 | | |  |
|  | | 2.1 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Cilacap | | Cakupan kecamatan yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara | | 24 Kecamatan | | 955.311.731 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Cilacap | Cakupan kecamatan yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara | | | 24 Kecamatan | 955.311.731 | | |  |
| 3 | |  | | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | Cilacap | | Persentase Pemilih yang Berpartisipasi pada Pemilu | | 70 % | | 59.534.170.282 | | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | Cilacap | Persentase Pemilih yang Berpartisipasi pada Pemilu | | | 70 % | 59.534.170.282 | | |  |
|  | | 3.1 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politi | Cilacap | | Jumlah anggota masyarakat yang menggunakan hak pilihnya | | Jumlah | | 59.534.170.282 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politi | Cilacap | Jumlah anggota masyarakat yang menggunakan hak pilihnya | | | Jumlah | 59.534.170.282 | | |  |
| 4 | |  | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | Cilacap | | Persentase LSM/Ormas yang dibina/bimtek kebangsaan | | 50 % | | 115.000.000 | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | Cilacap | Persentase LSM/Ormas yang dibina/bimtek kebangsaan | | | 50 % | 115.000.000 | | |  |
|  | | 4.1 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Cilacap | | Persentase LSM/Ormas yang dibina/bimtek kebangsaan | | 50 % | | 115.000.000 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Cilacap | Persentase LSM/Ormas yang dibina/bimtek kebangsaan | | | 50 % | 115.000.000 | | |  |
| 5 | |  | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | Cilacap | | Cakupan kecamatan yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | | 24 Kecamatan | | 240.000.000 | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | Cilacap | Cakupan kecamatan yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | | | 24 Kecamatan | 240.000.000 | | |  |
|  | | 5.1 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Cilacap | | Cakupan kecamatan yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | | 24 Kecamatan | | 240.000.000 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Cilacap | Cakupan kecamatan yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | | | 24 Kecamatan | 240.000.000 | | |  |
| 6. | |  | | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | Cilacap | | Cakupan kecamatan yang terfasilitasi dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial | | 24 Kecamatan | | 861.250.000 | | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | Cilacap | Cakupan kecamatan yang terfasilitasi dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial | | | 24 Kecamatan | 861.250.000 | | |  |
|  | | 6.1 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Cilacap | | Cakupan kecamatan yang terfasilitasi dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial | | 24 Kecamatan | | 861.250.000 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Cilacap | Cakupan kecamatan yang terfasilitasi dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial | | | 24 Kecamatan | 861.250.000 | | |  |
|  | |  | | **JUMLAH SELURUH…………..…** |  | |  | |  | | **66.291.022.252** | | **JUMLAH SELURUH…………..…** |  |  | | |  | **66.291.022.252** | | |  |

1. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Bakesbangpol Kabupaten Cilacap akan menambah program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten Cilacap lainnya. Usulan tersebut dapat berupa usulan yang ditujukan secara langsung maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan maupun desa. Masukan dari legislatif melalui pokok pokok pikiran anggota legislatif juga menjadi acuan dasar bagi Bakesbangpol Kabupaten Cilacap untuk membuat usulan program/kegiatan. Untuk tahun 2024 tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang diterima oleh Bakesbangpol Kabupaten Cilacap seperti yang diterlihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABEL 2.4** | | | | | | | | | | | |
| **USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024** | | | | | | | | | | | |
| **KABUPATEN CILACAP** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***SKPD*** | | | | ***:*** | ***Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap*** | | | |  |  |  |
| **Kode** | | | | |  | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | | **Indikator Kinerja** | **Besaran/Volume** | **Catatan** |
| **1** | | | | |  | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **NIHIL** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# **BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN BAKESBANGPOL**

1. **Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim.
5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
7. Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah.

Adapun tema Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas.Sedangkan prioritas pembangunan nasional tahun 2024 adalah:

1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan.
2. Pasyarakat Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
3. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas.
4. Masyarakat Peningkatan Permukiman yang Layak bagi Masyarakat.
5. Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar.

Bakesbangpol Kabupaten Cilacap merupakan lembaga yang bertugas membantu Bupati dalam merumuskan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Fasilitasi Politik dan Keamanan serta Ketahanan Bangsa agar dapat berjalan secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional.

1. **Tujuan dan Sasaran Renja Bakesbangpol**
2. **TUJUAN**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menurunkan gangguan keamanan wilayah.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol Kab. Cilacap.
3. **SASARAN**

Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan progam dan kegiatan pada tahun yang berjalan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan kecamatan dalam keamanan wilayah.
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kab. Cilacap.

**Tabel 3.1**

**Tujuan dan Sasaran Bakesbangpol Kab. Cilacap Tahun 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Indikator Tujuan** | **Target kinerja tujuan** | **Sasaran** | **Indikator sasaran** | **Target Kinerja Tujuan/Sasaran** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** |  | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 1 | Menurunkan gangguan keamanan wilayah | Jumlah kasus konflik sosial | 0 kasus | Meningkatkan pembinaan kecamatan dalam keamanan wilayah | Persentase cakupan kecamatan yang dibina dalam keamanan wilayah | 100% |
| **No** | **Tujuan** | **Indikator Tujuan** | **Target kinerja tujuan** | **Sasaran** | **Indikator sasaran** | **Target Kinerja Tujuan/Sasaran** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** |  | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 2 | Meningkatkan Akuntabilitas KinerjaBadan Kesbangpol Kab.Cilacap | Nilai AKIP Badan Kesbangpol | 72 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kab. Cilacap | Nilai IKM/SKM Badan Kesbangpol Kab. Cilacap | 82 |

1. **Inovasi Perangkat Daerah**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap dalam mendukung pencapaian visi dan misi adalah dengan melakukan berbagai pembenahan dan peningkatan sistem danprosedur, sarana prasarana dan profesionalisme serta melakukan inovasi-inovasi baru dalamrangka memperkuatdan mengembangkanketerpaduan pelayanan prima.

* 1. Adapun inovasi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap yaitu “**LAYAR SUREKO MAWA RASTATIS (Pelayanan Penerbitan Surat Ijin Rekomendasi Penelitian bagi Mahasiswa yang Ramah Berkualitas dan Gratis)”** adalah Pelayanan berupa penerbitan surat ijin rekomendasi penelitian kepada masyarakat dengan menggunakan Aplikasi e litbang, dengan adanya inovasi ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses aplikasi dan menyingkat waktu untuk pengajuan surat ijin rekomendasi Kuliah Kerja Nyata yang semula harus datang ke kantor bakesbangpol. Sehingga dengan adanya inovasi ini diharapkan memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat, diantaranya dapat diakses dimanapun dan kapanpun, memudahkan komunikasi dua arah tanpa harus bertatap muka langsung, selain mempermudah juga dapat meminimalisir penularan Covid-19 yang sekarang ini sedang merebak di seluruh dinia tanpa terkecuali di Indonesia dan Kabupaten Cilacap pada Khususnya. Selain itu juga proses pengurusannya lebih cepat dan lebih mudah.

1. **Program dan Kegiatan**

Untuk dapat mencapai visi dan misinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap Tahun 2024 melaksanakan urusan pemerintahan dengan 6 program, 11 kegiatan, dan 21 sub kegiatan sebagai berikut :

1. **Program**

Program yang telah disusun dan ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap adalah :

* 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
  3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
  4. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
  5. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
  6. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

1. **Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

* Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
* Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

* Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

* Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

* Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
* Penyediaan Bahan Logistik Kantor
* Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
* Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

* Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
* Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

* Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
* Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
* Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

* Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

1. Perumusan Keijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

* Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang PendidikanPolitik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
* Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

* Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

* Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penaganan Konflik Sosial

* Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penang Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah
* Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

# **BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Jumlah program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap Tahun 2024 sebanyak 6 program, 11 kegiatan dan 21 sub kegiatan. Adapun program yang telah disusun dan ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
4. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
5. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
6. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Rencana kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

* Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
* Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

* Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

* Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

* Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
* Penyediaan Bahan Logistik Kantor
* Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
* Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

* Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
* Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

* Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
* Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
* Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

* Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

1. Perumusan Keijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

* Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang PendidikanPolitik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, sertaPemantauan Situasi Politik Di Daerah
* Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

* Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

* Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penaganan Konflik Sosial

* Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penang Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah
* Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Bakesbangpol Kabupaten Cilacap Tahun 2024 yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 66.291.022.252,00.

Program dan kegiatan Renja Bakesbangpol Kabupaten Cilacap Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana table 4.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABEL 4.1** | | | | | | | | | | | |
| **RUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025** | | | | | | | | | | | |
| **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CILACAP** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NO** | **KODE** | **URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN** | | **CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** | | | | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025** | | **PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB** |
| **TARGET 2024** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** | **LOKASI** | **SUMBER DANA** |
| **TARGET** | **PAGU INDIKATIF (Rp)** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** |  | |  | **66.291.022.252,00** |  |  |  | **10.242.041.331,00** |  |
|  | **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** |  | |  | **66.291.022.252,00** |  |  |  | **10.242.041.331,00** |  |
| **1.** | **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** |  | |  | **4.585.290.239,00** |  |  |  | **4.773.000.000,00** | **Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik** |
|  |  |  | ***Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah (%)*** | | ***100.00*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah (%)*** | | ***100*** |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | |  | 38.675.000,00 |  |  |  | 42.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat daerah (%)* | | *100* |  | *(Bakesbangpol kab.Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *100* |  |  |
|  | 8.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | |  | 23.937.500,00 |  |  |  | 26.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  (Dokumen)* | | *2.00* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *2.00* |  |  |
|  |  |  |  | *Penyusunan Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah (Dokumen)* | *2* | *23.937.500,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* |  |  |  |
|  | 8.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | |  | 14.737.500,00 |  |  |  | 16.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)* | | *4.00* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *4.00* |  |  |
|  |  |  |  | *Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP (Laporan)* | *4* | *14.737.500,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* |  |  |  |
|  | 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | |  | 3.275.445.439,00 |  |  |  | 3.600.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat daerah (%)* | | *100* |  | *(Bakesbangpol kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *100* |  |  |
|  | 8.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  | |  | 3.275.445.439,00 |  |  |  | 3.600.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)* | | *23.00* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *23.00* |  |  |
|  |  |  |  | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)* | *23* | *3.275.445.439,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
|  | 8.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | |  | 17.500.000,00 |  |  |  | 20.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah (%)* | | *33* |  | *(Donan, Cilacap Tengah, KAB. CILACAP)* |  | *33* |  |  |
|  | 8.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |  | |  | 17.500.000,00 |  |  |  | 20.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)* | | *1* |  | *(Jl. D.I. Panjaitan No 1, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *1* |  |  |
|  |  |  |  | *Belanja Pakaian Batik Tradisional (Buah)* | *35* | *17.500.000,00* | *(Jl, D.I. Panjaitan Nomor 1, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* |  |  |  |
|  | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | |  | 572.522.700,00 |  |  |  | 384.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah (%)* | | *100* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *100* |  |  |
|  | 8.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | |  | 48.812.700,00 |  |  |  | 54.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)* | | *12.00* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *12.00* |  |  |
|  |  |  |  | *Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor (ATK) (Paket)* | *12* | *48.812.700,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* |  |  |  |
|  | 8.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |  | |  | 73.710.000,00 |  |  |  | 81.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)* | | *12.00* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *12.00* |  |  |
|  |  |  |  | *Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)* | *12* | *73.710.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* |  |  |  |
|  | 8.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | |  | 50.000.000,00 |  |  |  | 55.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)* | | *12.00* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *12.00* |  |  |
|  |  |  |  | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)* | *12* | *50.000.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* |  |  |  |
|  | 8.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | |  | 400.000.000,00 |  |  |  | 194.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)* | | *12.00* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *12.00* |  |  |
|  |  |  |  | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)* | *12* | *400.000.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* |  |  |  |
|  | 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | |  | 490.337.300,00 |  |  |  | 517.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah (%)* | | *100* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *100* |  |  |
|  | 8.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | |  | 102.957.700,00 |  |  |  | 114.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)* | | *12.00* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *12.00* |  |  |
|  |  |  |  | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)* | *12* | *102.957.700,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* |  |  |  |
|  | 8.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | |  | 50.000.000,00 |  |  |  | 55.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)* | | *12.00* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *12.00* |  |  |
|  |  |  |  | *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laporan)* | *12* | *50.000.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* |  |  |  |
|  | 8.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | |  | 337.379.600,00 |  |  |  | 348.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)* | | *12.00* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *12.00* |  |  |
|  |  |  |  | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan) (Laporan)* | *12* | *337.379.600,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* |  |  |  |
|  | 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | |  | 190.809.800,00 |  |  |  | 210.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah (%)* | | *100* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *100* |  |  |
|  | 8.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | |  | 125.810.800,00 |  |  |  | 138.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)* | | *15.00* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *15.00* |  |  |
|  |  |  |  | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)* | *15* | *125.810.800,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* |  |  |  |
|  | 8.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | |  | 38.000.000,00 |  |  |  | 42.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  (Unit)* | | *40.00* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *40.00* |  |  |
|  |  |  |  | *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor) (Unit)* | *40* | *38.000.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* |  |  |  |
|  | 8.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  | |  | 26.999.000,00 |  |  |  | 30.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)* | | *1.00* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *1.00* |  |  |
|  |  |  |  | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)* | *1* | *26.999.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* |  |  |  |
| **2.** | **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** |  | |  | **955.311.731,00** |  |  |  | **958.732.331,00** | **Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik** |
|  |  |  | ***cakupan kecamatan yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara (Kecamatan)*** | | ***24.00*** |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |  | |  | 955.311.731,00 |  |  |  | 958.732.331,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Cakupan kecamatan yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara (Kecamatan)* | | *24* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *24* |  |  |
|  | 8.01.02.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |  | |  | 955.311.731,00 |  |  |  | 958.732.331,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)* | | *1300.00* |  | *(Bakesbangpol kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *1300.00* |  |  |
|  |  |  |  | *Pembinaan Wawasan Kebangsaan Ideologi Pancasila dan Aswaja (Orang)* | *250* | *0* | *(Jalan Mundu RT 04 RW 04 Kalisabuk Kesugihan Cilacap, KAB. CILACAP)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai Nilai Luhur Budaya Bangsa (Orang)* | *200* | *39.812.500,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat (Orang)* | *200* | *40.000.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda (Orang)* | *500* | *100.000.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Sosialisasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) (Orang)* | *200* | *40.000.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Sosialisasi, Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila (Orang)* | *200* | *40.000.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Sosialisasi, Seleksi dan Pembinaan Paskibraka Kab. Cilacap (Paket)* | *1* | *695.499.231,00* | *(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* |  |  |  |
| **3.** | **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** |  | |  | **59.534.170.282,00** |  |  |  | **3.285.309.000,00** | **Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik** |
|  |  |  | ***Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada (%)*** | | ***70.00*** |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |  | |  | 59.534.170.282,00 |  |  |  | 3.285.309.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Persentase pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilu (%)* | | *70* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *70* |  |  |
|  | 8.01.03.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |  | |  | 312.000.000,00 |  |  |  | 345.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)* | | *1440.00* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *1440.00* |  |  |
|  |  |  |  | *Bimtek Administrasi Partai Politik (Orang)* | *40* | *32.000.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Penyuluhan Kepada Masyarakat (Orang)* | *700* | *140.000.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Sosialisasi Undang Undang Pemilu (Orang)* | *700* | *140.000.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
|  | 8.01.03.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |  | |  | 59.222.170.282,00 |  |  |  | 2.940.309.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)* | | *4.00* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *2.00* |  |  |
|  |  |  |  | *Fasilitasi Bantuan Partai Politik (Laporan)* | *1* | *21.525.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Hibah Bawaslu (Laporan)* | *1* | *5.570.029.282,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, KAB. CILACAP)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Hibah Kepada PAN (Laporan)* | *1* | *227.136.000,00* | *(-, KAB. CILACAP)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Hibah Kepada Partai Demokrat (Laporan)* | *1* | *179.802.000,00* | *(-, KAB. CILACAP)* | *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Hibah Kepada Partai Gerindra (Laporan)* | *1* | *394.098.000,00* | *(-, KAB. CILACAP)* | *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Hibah Kepada Partai Golkar (Laporan)* | *1* | *512.736.000,00* | *(-, KAB. CILACAP)* | *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Hibah Kepada Partai Nasdem (Laporan)* | *1* | *176.490.000,00* | *(-, KAB. CILACAP)* | *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Hibah Kepada PDIP (Laporan)* | *1* | *589.386.000,00* | *(-, KAB. CILACAP)* | *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Hibah Kepada PKB (Laporan)* | *1* | *407.004.000,00* | *(-, KAB. CILACAP)* | *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Hibah Kepada PKS (Laporan)* | *1* | *190.854.000,00* | *(-, KAB. CILACAP)* | *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Hibah Kepada PPP(Laporan)* | *1* | *241.278.000,00* | *(-, KAB. CILACAP)* | *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Hibah KPU (Laporan)* | *1* | *50.711.832.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
| **4.** | **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** |  | |  | **115.000.000,00** |  |  |  | **45.000.000,00** | **Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik** |
|  |  |  | ***Persentase LSM/Ormas yang dibina / bimtek kebangsaan (%)*** | | ***50.00*** |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |  | |  | 115.000.000,00 |  |  |  | 45.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Persentase LSM/Ormas yang dibina (%)* | | *50* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *75* |  |  |
|  | 8.01.04.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |  | |  | 115.000.000,00 |  |  |  | 45.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)* | | *200.00* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *200.00* |  |  |
|  |  |  |  | *Hibah Penguatan Kegiatan Organisasi PPDI (Paket)* | *1* | *75.000.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *Peningkatan Kesadaran Ketahanan Bangsa Bagi Ormas (Orang)* | *200* | *40.000.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
| **5.** | **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** |  | |  | **240.000.000,00** |  |  |  | **252.000.000,00** | **Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik** |
|  |  |  | ***cakupan kecamatan yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Kecamatan)*** | | ***24.00*** |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya |  | |  | 240.000.000,00 |  |  |  | 252.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Cakupan kecamatan yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Kecamatan)* | | *24* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *24* |  |  |
|  | 8.01.05.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |  | |  | 240.000.000,00 |  |  |  | 252.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)* | | *1200.00* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *1200.00* |  |  |
|  |  |  |  | *Forum Kerukunan Umat Beragama Pemuda Lintas Iman (Orang)* | *100* | *20.000.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Forum Pembauran Kebangsaan (Orang)* | *150* | *30.000.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Jambore Anti Narkoba (Orang)* | *200* | *40.000.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)(Orang)* | *150* | *30.000.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Bagi Pelajar dan Santri (Orang)* | *200* | *40.000.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Peningkatan Penyuluh dan Pendidik Kerukunan Umat Beragama (Orang)* | *100* | *20.000.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Refleksi Budaya Dalam Kaitannya dengan Ketahanan Bangsa (Orang)* | *100* | *20.000.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Seminar, Talkshow Ketahanan Ekonomi (Orang)* | *100* | *20.000.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama (Orang)* | *100* | *20.000.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
| **6.** | **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** |  | |  | **861.250.000,00** |  |  |  | **928.000.000,00** | **Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik** |
|  |  |  | ***cakupan kecamatan yang terfasilitasi dalam upaya pencagahan dan penanganan konflik sosial (Kecamatan)*** | | ***24.00*** |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial |  | |  | 861.250.000,00 |  |  |  | 928.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Cakupan kecamatan yang terfasilitasi dalam upaya pencegahandan penanganan konflik sosial (Kecamatan)* | | *24* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *24* |  |  |
|  | 8.01.06.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |  | |  | 227.250.000,00 |  |  |  | 240.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)* | | *4.00* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *4.00* |  |  |
|  |  |  |  | *Penanganan Konflik Sosial (Laporan)* | *1* | *39.750.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Pengendalian Keamanan Lingkungan (Laporan)* | *1* | *39.750.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Peningkatan Kompetensi Bagi Inteligent Daerah (Laporan)* | *1* | *19.999.800,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
|  |  |  |  | *Rapat Kerja Anggota FKDM (Laporan)* | *1* | *127.750.200,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
|  | 8.01.06.2.01.06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota |  | |  | 634.000.000,00 |  |  |  | 688.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
|  |  |  | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)* | | *12.00* |  | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* |  | *12.00* |  |  |
|  |  |  |  | *Kewaspadaan Dini Daerah (Laporan / Dokumen)* | *12* | *634.000.000,00* | *(Bakesbangpol Kab. Cilacap, Donan, Kec. Cilacap Tengah)* | *DANA UMUM* |  |  |  |
|  | **J U M L A H** | | | | | **66.291.022.252,00** |  | | | 10.242.041.331,00 |  |

# **BAB V**

**P E N U T U P**

Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Cilacap Tahun 2024 merupakan tahapan awal yang harus dilaksanakan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja ( Renja ) Badan Kesbangpol Kabupaten Cilacap Tahun 2024 yang definitif. Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Cilacap menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan–persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* ( CBD ) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku – pelaku ( stakeholders ) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembus ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar – benar dikedepankan.

Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Cilacap Tahun 2024 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesbangpol dan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun. Rencana kerja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Kesbangpol Kabupaten Cilacap sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Cilacap, Juli 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN CILACAP

TARYO, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196908081997031007

Pj. BUPATI CILACAP,

YUNITA DYAH SUMINAR